
OPTIMALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN SUMBAWA

Raudhatul Ilmi
STAI Nahdlatul Wathan Samawa
raudhatulilmi04@gmail.com

Baiq Hidayatun Nisa
STAI Nahdlatul Wathan Samawa
baiqnisaa2208@gmail.com

Adi Ardiyansyah
STAI Nahdlatul Wathan Samawa
adipusu270404@gmail.com

Siti Nur Hidayati
STAI Nahdlatul Wathan Samawa
siti.nurhidayati@stainwsamawa.ac.id

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan utama di kabupaten Sumbawa dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan untuk mengidentifikasi strategi optimal untuk meningkatkan hasil dari kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau dokumen berupa jurnal hasil-hasil penelitian sebelumnya, sesuai dengan topik jurnal yang di kaji. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kebijakan, masih terdapat tantangan terkait koordinasi antar lembaga, pemanfaatan sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi program. Kajian ini merekomendasikan beberapa tindakan strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, antara lain perbaikan perencanaan program, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan mekanisme evaluasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Optimalisasi, Kebijakan, Pemerintah, Kemiskinan*

LATAR BELAKANG

Kemiskinan menjadi isu yang sering terjadi dan menjadi topik hangat disetiap daerah. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan hingga

saat ini terutama di kabupaten Sumbawa. Meskipun Kabupaten Sumbawa kaya akan sumber daya alam (SDA), namun angka kemiskinan mengalami peningkatan dari tahun ke. Wilayah yang kaya sumber daya alam ini sangat prihatin karena potensi alam yang dimilikinya tidak mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menentukan stok sumber daya menggunakan standar yang disebut garis kemiskinan (Firstiani & Egamawati, 2021).

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar dan kompleks. Setiap daerah mempunyai permasalahan utama yang berbeda-beda sebagai penyebab utama kemiskinan di daerahnya. Sebab, yang paling mengetahui kemiskinan lokal adalah masyarakat lokal itu sendiri. Otonomi daerah berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dan tidak bertentangan dengan kebijakan pusat, sehingga menghasilkan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan percepatan proses pembangunan, yang pada akhirnya membantu masyarakat miskin untuk dapat menjangkaunya secara langsung. Demikian pula permasalahan kemiskinan akan lebih teratasi di setiap daerah dengan terwujudnya otonomi daerah (TNP2K, 2019).

Oleh karena itu, solusi penanggulangan kemiskinan tidak dapat terpusat pada pemerintah pusat saja, namun memerlukan kepemimpinan, kekompakan dan saling melengkapi antara pemerintah pusat dan daerah. Penyebab utama kemiskinan di suatu daerah mempunyai akar permasalahan yang berbeda-beda, dan daerah yang mempunyai informasi yang lebih baik mengenai solusi pengentasan kemiskinan akan lebih mempunyai sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi budaya, kondisi sosial, pembangunan ekonomi, dan stabilitas yang dapat disesuaikan dengan kondisi potensi daerah (Adhiem, 2019).

Di kabupaten Sumbawa, pemerintah telah menerapkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, termasuk program sosial ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Namun, seiring berjalannya waktu, program-program tersebut gagal mencapai hasil yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari persentase angka kemiskinan yang sangat kecil yang turun dari tahun ke tahun, bahkan meningkat di beberapa kabupaten dan kota. Optimalisasi program pengentasan kemiskinan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program yang dilaksanakan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan semacam ini adalah diperolehnya informasi penting

yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem program yang dilaksanakan, serta munculnya rekomendasi khusus berdasarkan sumber daya lokal.

KAJIAN TEORITIS

A. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah besar yang sering terjadi di semua negara, terutama di negara-negara berkembang. Kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari secara memadai. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan menghasilkan produk untuk dijual, dan kurangnya peran pemerintah sehingga sulit untuk mengentaskan kemiskinan (Nafi, 2021).

Secara sosio-psikologis, kemiskinan sebagai suatu kerugian yang disebabkan bukan oleh kemauan masyarakat miskin, melainkan oleh sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh kekuatan yang ada. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan materi (Suradi, 2011). Dalam hal ini John Frienmad berpandangan kemiskinan terjadi karena adanya kekuasaan sosial yang tidak seimbang, seperti : *pertama*, kelompok pemilik modal yang berkembang. *Kedua*, memiliki sumber pendapatan. *Ketiga*, kelompok sosial dalam berpolitik. *Keempat*, kelompok yang memiliki jaringan yang luas. *Kelima*, kelompok yang memiliki cukup informasi tentang kondisi sekitar guna mempertahankan hidup (Maisanti et al., 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan diartikan sebagai keadaan kurang sejahtera, sedangkan kemiskinan dihitung dalam satuan Rp (Rupiah) per orang per bulan. Kebutuhan fisik minimum (KFM) sebagai tolok ukur untuk mendefinisikan kemiskinan diartikan sebagai keadaan kekurangan kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, sandang, papan, dan kebutuhan pokok lainnya berdasarkan jumlah kalori, protein, vitamin, dan mineral penting lainnya yang layak untuk pekerja. Setiap orang memerlukan setidaknya 2100 kalori (kelompok makanan) setiap hari, serta kebutuhan minimum lainnya (tidak termasuk makanan) seperti perumahan, sandang, kesehatan, dan pendidikan (Huraerah, 2013). Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa kemiskinan merupakan suatu proses dan keadaan yang diakibatkan oleh

ketidakmampuan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor kemiskinan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori sebagai berikut : (Marthalina, 2018)

1. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti kelangkaan sumber daya dan rendahnya perkembangan teknologi, serta peningkatan pesat jumlah penduduk di tengah sumber daya alam yang terbatas. Kemiskinan jenis ini umumnya tidak menimbulkan kesenjangan yang terlalu besar
2. Kemiskinan struktural, atau kemiskinan buatan, terjadi akibat kebijakan dari sistem supra-struktural politik yang membentuk struktur sosial. Di lapangan, penduduk miskin sering kali tidak dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Misalnya, kebijakan dapat menyebabkan sekelompok masyarakat mendominasi penguasaan sarana ekonomi, sementara kelompok lainnya tidak memiliki kesempatan yang sama. Dalam kategori ini, kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya sangat tinggi.
3. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang muncul akibat beban tradisi atau adat, seperti upacara perkawinan, kematian, dan pesta adat lainnya. Selain itu, kemiskinan ini juga disebabkan oleh sikap mentalitas yang lamban, malas, konsumtif, dan kurang berorientasi ke masa depan. .

C. Mengukur Kemiskinan

Kemiskinan dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Indikator kuantitatif kemiskinan meliputi tingkat pendapatan rumah tangga, tingkat konsumsi rumah tangga, dan lain-lain. Indikator kualitatif antara lain meliputi tingkat pendidikan, kondisi perumahan, dan lain-lain. Masyarakat miskin pada umumnya tidak memiliki keterampilan. Mereka tidak memiliki pendapatan, pendidikan, kesehatan, atau kebebasan politik yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengukur kemiskinan (Sinaga et al., 2022).

Langkah terpenting dalam mengukur kemiskinan adalah menentukan indikator kesejahteraan seperti pendapatan per kapita dan konsumsi per kapita.

Sebagai aturan umum, pendapatan terdiri dari konsumsi pribadi dan perubahan aset. Sebagaimana dijelaskan pada hipotesis pendapatan permanen, konsumsi dapat mengukur pendapatan permanen karena konsumsi seseorang dipengaruhi oleh pendapatan permanen. Oleh karena itu, kebahagiaan dapat diukur dengan menggunakan jumlah konsumsi.

D. Strategi Pengentasan Kemiskinan

Gagasan Strategi Pengentasan Kemiskinan *World Bank* menyatakan bahwa strategi pengentasan kemiskinan akan dikembangkan setiap 10 tahun, dimulai dengan menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Strategi pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Gunnar Adler Carlson antara lain: (1) Strategi jangka pendek: mendistribusikan sumber daya yang cukup kepada masyarakat miskin, dengan menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan distribusi pendapatan yang merata. (2) strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian daerah; Perbaikan jangka panjang dengan meningkatkan dan memperkaya kehidupan pribadi dan sosial yang bermartabat (Papiliya, 2020).

Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang menghadapi kemiskinan sementara, yang kedua adalah memperkuat dan mencegah kemiskinan baru, dan yang kedua adalah melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang menghadapi kemiskinan kronis. Strategi ini dihadirkan dalam tiga program yang langsung menyoal masyarakat miskin. (1) Menyediakan kebutuhan pokok. (2) Pembentukan sistem jaminan sosial. (3) Pengembangan budaya perusahaan. Selain itu, masyarakat miskin mempunyai strategi tersendiri untuk mengatasi kemiskinan. Adapun strategi yang digunakan antara lain mengakses kredit dari lembaga informal, memperpanjang jam kerja, melibatkan anggota keluarga dalam bekerja, beremigrasi, dan menabung (Sinaga et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian literatur dengan menggunakan referensi dari berbagai jurnal terkemuka. Penelitian studi pustaka (library research)

adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan landasan teori melalui kajian karya akademik, jurnal, dan makalah terkait yang sesuai dengan penelitian yang diteliti. Akhirnya seluruh data berhasil dikumpulkan secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan optimalisasi kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sumbawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Tabel 1.1 Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Dari Tahun 2021-2023

Indikator Kemiskinan	Kemiskinan Kabupaten Sumbawa		
	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	65,99	64,73	67,4
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,91	13,5	13,91

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 65,99 ribu jiwa, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 64,73 ribu jiwa, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 67,4 ribu jiwa. Angka kemiskinan di wilayah Sumbawa masih relatif tinggi dan berada di atas rata-rata nasional. Program pengentasan kemiskinan pemerintah pusat yang memiliki anggaran relatif besar masih kurang optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

Pembahasan

Program pengentasan kemiskinan sebenarnya diprogramkan secara internal oleh masing-masing lembaga daerah, dan mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan keterampilan dan pendapatan masyarakat miskin, dapat mendorong pembangunan makro dan mikro serta keberlanjutan. termasuk: Program pengentasan kemiskinan secara umum sama, namun bisa juga berbeda-beda. Program yang sama biasanya merupakan suatu

program yang dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah. Salah satu bentuk dukungannya pun dapat dibedakan menjadi dua jenis. (1) Dukungan langsung, yaitu dukungan yang diberikan secara langsung, dan (2) Dukungan tidak langsung, berupa insentif kepada masyarakat yang berkembang agar dapat meningkatkan produksi yang secara signifikan (Rizayani et al., 2022).

Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah salah satu program bantuan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Program ini dalam jangka pendek mampu menopang kebutuhan keluarga si penerima. Sedangkan dalam jangka panjang mengurangi rantai kemiskinan masyarakat (Sinaga et al., 2022). Di kabupaten Sumbawa PKH ini sudah direalisasikan dengan baik. Hal ini merujuk pada indikator pencapaian program ini yakni ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pengetahuan dan ketepatan tujuan program, dan pemantauan program yang berjalan efektif (Aldiansyah et al., 2024).

Dalam memantau realisasi program ini, pemerintah kabupaten Sumbawa secara berkala melakukan monitoring pelaksanaan agar tepat sasaran. Monitoring menghadirkan seluruh fasilitator (pendamping) guna mengidentifikasi temuan masalah yang timbul di masyarakat terkait PKH, kemudian mencari alternatif solusi persoalan tersebut (Diskominfotik, 2019).

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan yang ditujukan untuk masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat yang hampir miskin, masyarakat miskin, dan masyarakat sangat miskin. Dana bantuan ini bersumber dari dana desa sebagai bentuk perlindungan dan jaminan sosial. Bentuk BLT ini yakni pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan (Sofi, 2021).

Di kabupaten Sumbawa penyaluran BLT dilakukan dengan 3 tahap yakni bulan Januari, Februari, dan Maret. Dalam sambutannya kepala desa penerima menyampaikan bahwa adanya BLT ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini

sejalan dengan tujuan adanya program ini yakni meringankan beban penerima dan angka kemiskinan menurun (Susilawati, 2024).

3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program pemerintah dalam bentuk pangan yang diberikan setiap bulan kepada penerima. Pangan ini meliputi karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sumber vitamin, dan mineral (Sinaga et al., 2022). Program subsidi pangan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan (Mufatiroh et al., 2021).

Di kabupaten Sumbawa penyaluran BPNT sudah berjalan sesuai dengan mekanisme penyaluran. Penyaluran BPNT ini langsung di monitori oleh dinas sosial agar tepat sasaran dan mengurangi resiko penyalahgunaan. Pihak pemerintah Sumbawa berharap program BPNT ini mengurangi beban pengeluaran penerima manfaat melalui pemenuhan pangan dengan gizi seimbang (Infopublik.id, 2019).

Program Pemerintah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Sektor

1. Perikanan Budidaya, bentuk bantuan yang diberikan :
 - Air laut: bantuan bibit, pakan untuk komoditas krapu dan udang.
 - Air tawar: penebaran bibit di perairan umum seperti waduk, bendungan dan sungai dari Dana Alokasi Desa (DAD).
 - Pelatihan dan pemberdayaan dari dinas perikanan.
2. Bidang Sosial dan Ekonomi, bentuk bantuan yang diberikan :
 - Program desa bebas rentenir (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melalui BUMDES. Masyarakat yang membutuhkan dana tidak berutang ke rentenir, tetapi ke BUMDES tanpa bunga. Peminjam hanya dikenakan biaya pokok dan administrasi saja.
 - Pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat dari Dinakertrans. Target adalah masyarakat mantan TKI/TKW. Diberikan pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
 - UMKM: *homeindustry* (3orang/kelompok). Pengembangan industri berbasis PUD (Produk Unggulan Daerah). Contoh industri krupuk:

bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, bantuan kemasan dan pelabelan, uji-uji laboratorium untuk menentukan batas kedaluwarsa.

3. Pendidikan dan Kesehatan

- Air minum sudah 60% PDAM
- Sektor kesehatan: BPJS, KIS, KIP

4. Infrastruktur

- Perbaikan jalan desa dan irigasi
- Pembangunan jembatan, bandara dan Pelabuhan.

Secara umum program pengentasan kemiskinan berdampak kecil terhadap kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. Angka kemiskinan dan beberapa indikator kemiskinan mengalami penurunan, namun laju penurunannya sangat lambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain program bantuan yang diberikan tidak berbasis data terpadu dan hanya fokus pada indikator keberhasilan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sehingga tidak mengarah kepada masyarakat miskin. Misalnya, di sektor pertanian, produksi pertanian di bawah 5 ton per hektar dianggap miskin dan berhak menerima bantuan. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh indikator yang buruk dan masih buram. Sekitar 73.000 orang hidup dalam kategori miskin di Sumbawa.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan, maka peneliti mengusulkan beberapa tindakan strategis yang bisa dilakukan antara lain :

1. Perbaikan Perencanaan Program, dapat dilakukan dengan cara :

- Analisis data yang akurat : Menggunakan data yang akurat dan terkini untuk mengidentifikasi area dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.
- Partisipasi multipihak : Melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, lembaga non pemerintah, dan sektor swasta dalam perencanaan program.
- Pemetaan aset dan potensi daerah : Mengidentifikasi aset dan potensi lokal yang dapat dioptimalkan untuk pengentasan kemiskinan.

- Fokus pada program yang terbukti efektif :Mengadopsi dan mengadaptasi program yang telah terbukti berhasil di daerah lain dengan penyesuaian lokal.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- Transparansi dan informasi : Memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai program-program yang ada, serta bagaimana masyarakat berpartisipasi.
 - Pemberdayaan komunitas : Membentuk dan mendukung kelompok masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
 - Pelatihan dan Peningkatan kapasitas : Memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan program yang dijalankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Sumbawa yaitu PKH, BLT, BPNT, KIP dan bentuk program khusus – program yang pendanaannya bersumber dari DAK desa. Dampak program ini terhadap masyarakat masih belum terlalu efektif, hal ini terlihat dari angka kemiskinan yang cenderung stagnan dan indeks kedalaman kemiskinan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Salah satu program yang dioptimalkan pemerintah adalah program PKH dengan memastikan cakupan bantuan sosial yang diterima anggota PKH dan memantau pemenuhan kewajibannya sebagai anggota PKH. Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan layanan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Adhiem, M. A. (2019). *Optimalisasi pengelolaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan*. 11(14).
- Aldiansyah, C., Hailuddin, H., & Astuti, E. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Oportunitas : Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 25–34. <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v3i1.578>
- Diskominfortik. (2019). Bupati Berharap PKH Mampu Berperan Tanggulangi Kemiskinan. *Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Sumbawa*. <https://diskominfortik.sumbawakab.go.id/berita/id/768/bupati-berharap-pkh-mampu-berperan-tanggulangi-kemiskinan.html>
- Firstiani, R., & Egamawati, E. (2021). Analisis Efisiensi Program Bantuan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1), 96–116.
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Policy Strategy of Tackling Poverty in Indonesia. *Pemberdayaan Komunitas*, 12(1).
- Infopublik.id. (2019). *Bupati Buka Rakor Dan Evaluasi Pelaksanaan BPNT*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/383218/index.html>
- Maisanti, Bakar, J. A., & Jalilah. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENURUNAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *JIBES : Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 1–18.
- Marthalina. (2018). Peran pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten tangerang provinsi banten. *TRANSFORMASI:JURNAL MANAJEMEN PEMERINTAH*, 10(1), 1–24.
- Mufatiroh, E., Ratnawati, S., & Ananda Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sumputkecamatan Driyorejo. *Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 151–158. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v8i2.7>
- Nafi, B. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016-2019)*. 7(02), 953–960.
- Papiliya, J. (2020). KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 04(01), 77–91.
- Rizayani, S., Rezky, M., Handy, N., Warmanyah, E., & Mangkurat, U. L. (2022). KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA BANJARBARU. *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 2(1), 74–82.
- Sinaga, E., Lubis, T. A., Andy, E., Situmorang, O., Harahap, A. S., Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, K. (2022). *DAMPAK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATRA UTARA*. 3(2), 116–131.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>

Suradi. (2011). PERANAN SEKTOR INFORMAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN. *Informasi*, 16(03), 221–234.

Susilawati, S. (2024). *Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu, Sumbawa*. <https://www.desa-lito.sumbawakab.go.id/index.php/artikel/2024/3/13/penyaluran-bantuan-langsung-tunai-bl-t-dana-desa-desa-litokecamatan-moyo-hulu>

TNP2K. (2019). *Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan*.